

PENDIDIKAN POLITIK BAGI WANITA DALAM ERA REFORMASI SAAT INI

Oleh : Sri Pujiastuti

FBS Universitas Negeri Yogyakarta

Diterima 3 Mei 2001 / disetujui 4 September 2001

Abstract

In the present era of reforms there is considerable political tension and certain political education transforming current visions of politics needs to be conducted as an effort to decrease the political tension. It will present a new vision of politics longed for by those who dearly love peace. In this vision politics will no longer be a rough world allowing all means fair or foul, disavowing any ethics, etc. It will make women unafraid to take part in politics so that politics will no longer be a men's world. When the people are more fully aware of and know more about politics, then they will not be easily made to fight one another, made into blind fanatics, and made use of by the political elite to gain their desires.

The transformational political education can be done both formally through pedagogy and informally through androgynous thinking and by means of the mass media, both electronic and printed. The education uses a critical paradigm, i.e., a paradigm with the purpose of fundamentally transforming a system and structure.

The educational material can consist of the following: (1) the state and the state system, (2) the people's political rights, (3) political parties and profiles of political parties participating in general elections, (4) general elections and their systems, and (5) basic human rights, civil and political rights, and androgynous leadership.

Key Words: transformational politics, education, politics, reforms

Pendahuluan

Belum adanya pendidikan politik bagi rakyat yang memadai menyebabkan mereka mudah dijadikan alat elite politik untuk mendukungnya dalam mencapai tujuannya, tanpa tahu apa sebenarnya yang dibela atau diperjuangkannya. Selain itu kurang diindahkannya etika politik oleh elite politik menambah panasnya suhu perpolitikan di negara kita saat ini.

Adanya rasa takut dan ngeri bila orang terutama perempuan akan masuk dalam dunia politik dikarenakan politik dipandang *keras, kotor, main kayu,*

*menghalalkan segala cara, dan sebagainya. Politik dianggap dunia pria yang bersifat maskulin, seperti tampak dalam dunia perpolitikan kita saat ini. Hal ini mengakibatkan wanita menjauhi politik, wanita menjadi buta atau tidak tahu politik, padahal jumlah pemilih dalam peserta pemilu separuh lebih adalah wanita. Jika banyak wanita menjadi elite politik, situasi politik saat ini tidak akan terlalu *panas*. Hal ini dikarenakan bila hanya karakter maskulin saja yang ada dalam politik, dunia politik akan tampak *keras dan kasar*. Suasana politik menjadi semakin *panas* bila terjadi*

perbedaan pendapat antara partai-partai. Dunia politik pun memerlukan karakter feminin seperti kesabaran, intuisi, kepekaan, ketelitian, toleransi, tenggangrasa, dan kekeluargaan.

Dengan demikian, apabila banyak wanita yang terjun ke dunia politik akan dapat diubah situasi politik menjadi tidak *keras*, *kasar*, dan *menghalalkan segala cara*. Politik memerlukan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan androgini, yaitu kepemimpinan yang memadukan sifat-sifat maskulin dan feminin. Dengan demikian, dunia politik merupakan dunia yang terkesan tidak *keras* dan *kasar*, penuh mawas diri, dan santun sehingga suasana politik tidak *panas*. Untuk itu, diperlukan adanya visi politik baru, yakni politik transformatif.

Partisipasi dan Representasi Wanita di Bidang Politik

Suatu kenyataan bahwa setelah 56 tahun merdeka dan 8 kali negara kita melaksanakan Pemilu, keterwakilan dan keberadaan perempuan di lembaga-lembaga legislatif (DPR, MPR) dan partai-partai politik masih sangat kecil. Tegasnya kaum perempuan masih merupakan *silent majority* dalam struktur politik/kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan, baik dalam ruang lingkup keluarga, maupun dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apakah perlu keterwakilan perempuan secara fisik dalam posisi penentu kebijakan? Apakah tidak cukup diwakili oleh laki-laki yang ada di sana pada posisi penentu kebijakan? Jawabnya adalah partisipasi perempuan dalam politik yang diwujudkan secara fisik adalah perlu. Representasi fisik ini perlu karena kondisi di Indonesia masih kuat budaya patriarkhinya, serta kesadaran

kemitrasejajaran orang Indonesia belum tinggi. Yang dimaksud representasi di sini adalah keterwakilan atau kehadiran perempuan yang dapat menyampaikan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan di lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara.

Sumbung (2000) mengatakan bahwa "bisunya" suara perempuan dalam politik membawa dampak pada kebijakan dan peraturan perundangan yang dikeluarkan dan dijalankan, serta penentuan prioritas program/proyek pembangunan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya kurang menyentuh kebutuhan kaum wanita. Oleh karena itu perlu peningkatan kesadaran dan partisipasi wanita di bidang politik, agar perempuan sadar akan hak dan kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan hak memilih dan dipilih, dalam pemilu guna mewakili kaum wanita dalam memenuhi kebutuhannya.

Selain itu peningkatan wanita dalam pendidikan, kepekaan dan kepedulian terhadap situasi sosial, perluasan pengalaman serta wawasan kaum wanita perlu ditingkatkan sehingga masyarakat percaya untuk mewakilkan aspirasinya kepada wakil perempuan di parlemen

Politik dan Politik Transformatif

1. Politik

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan pengertian tersebut, politik itu berkaitan dengan: (1) negara dan badan-badan penyelenggara negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ormas dan orsospol, serta

serikat-serikat buruh/pekerja, (2) kekuasaan dan kepemimpinan sebagai posisi pemegang kekuasaan, (3) proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup bersama dalam segala bidang dan segala tingkatan dari keluarga sampai global, dan (4) pengalokasian sumber-sumber pembangunan yakni sumber alam dan sumber daya manusia (Pujiastuti, 2000).

Berpolitik dalam arti sempit adalah ikut serta dalam politik praktis, menjadi anggota atau pengurus sebuah partai politik. Dalam arti luas politik adalah aktif dalam suatu kegiatan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat dan mempunyai kesempatan, kemampuan, dan kekuasaan untuk mengambil keputusan mendasar yang menyangkut kebutuhan orang banyak (Tan dalam Nahiyah, 2000). Pengertian politik seperti itu masih kurang disadari oleh masyarakat terutama oleh kaum wanita. Hal ini merupakan tantangan yang harus diatasi bila kita ingin meningkatkan peran wanita di bidang politik.

Pengertian politik yang selama ini masih dikaitkan dengan karakter maskulin dan berorientasi pada dunia laki-laki seolah-olah ikut mendorong wanita tidak mau tahu atau menjauhi politik. Seakan-akan hanya karakter maskulin saja yang penting dan diperlukan untuk berpolitik, yakni: rasional, tegas, disiplin, bertanggung jawab, dan kuat. Menurut Hemas (2000) gambaran *licik, main kayu, tidak kenal kawan, dan menghalalkan segala cara* untuk mencapai tujuan di panggung politik menambah ketakutan wanita berpolitik terutama politik praktis. Hal ini akan semakin meningkatkan ketertinggalan wanita dalam dunia politik. Untuk itu solusi strategis terhadap ketertinggalan wanita dalam bidang politik menurut Hemas adalah bahwa (1) wanita harus

melihat dan memahami bahwa rintangan dalam memasuki politik itu tidak ada, tidak ada peraturan yang melarang, yang ada hanya tantangan dan kemungkinan, (2) membekali diri dengan pendidikan dan sikap yang kondusif seperti kompetensi diri, ketegasan kreatif, dan kemampuan mengajak orang lain. Yang dimaksud kompetensi diri adalah bahwa ia harus sadar akan dirinya setiap waktu, tidak mudah dipengaruhi oleh orang, situasi, maupun peristiwa. Ia punya rasa percaya diri yang kuat. Ketegasan kreatif meliputi kemampuan mengambil inisiatif, dan kemampuan memimpin.

Pada kenyataannya karakter feminin yang diwarnai dengan intuisi, kepekaan, toleransi, mawas diri, ketelitian, atau kekeluargaan sangat diperlukan atau esensial dalam berpolitik. Sifat-sifat feminin ini pun sebaiknya dimiliki oleh kaum politisi pria. Demikian juga sebaliknya di dalam politik karakter maskulin perlu diimbangi dengan karakter feminin sehingga membentuk kekuatan sinergi yang lebih efisien dan efektif karena kepemimpinan dalam politik mencerminkan kepemimpinan bangsa dan negara.

Menurut Sargent via Nahiyah (1999: 3) konsep kepemimpinan yang memadukan karakter feminin dan maskulin ini dikenal dengan kepemimpinan androgini. Tampaknya bila konsep ini diterapkan di negara kita, akan dapat menurunkan suhu politik saat ini. Salah satu caranya adalah dengan mewujudkan keterwakilan wanita secara proporsional dalam dunia politik atau pemerintahan. Perlunya keterwakilan wanita secara proporsional dalam legislatif ini pun pernah dikemukakan oleh Nurdiati Akhma anggota komisi VII DPR RI dalam dialog interaktif di TVRI pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2001. Hal itu tidak lain untuk meningkatkan

kesadaran dan partisipasi wanita dalam politik.

2. Politik Transformatif

Politik transformatif adalah politik yang menonjolkan kesetaraan jender. Memperjuangkan politik transformatif bagi perempuan berarti menggunakan kekuasaan untuk menciptakan perubahan, kesetaraan dan keadilan jender. Hal ini dikarenakan politik perlu dikembangkan secara menyeluruh/holistik, terpadu, berorientasi pada isu/masalah dan peka jender dalam menyongsong masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Politik transformatif selain menekankan kesetaraan dan keadilan jender, juga mentransformasikan nilai-nilai, proses, dan kelembagaan seperti keseimbangan jender, persamaan dan pemerataan, perdamaian, kesediaan melayani, partisipasi, pemberdayaan, keterbukaan, dan egalitarian.

Politik transformatif muncul karena ketidakadilan jender dalam politik dan sebagai usaha pemberdayaan politik bagi wanita sebab demokrasi tanpa kebersamaan pria dengan wanita bukanlah demokrasi. Karena jumlah perempuan lebih dari separuh jumlah penduduk adalah bagian mutlak dari rakyat Indonesia dan apabila sebagian besar komunitas perempuan Indonesia tidak ikut menentukan kebijakan negara dan tidak bebas dalam menyampaikan pendapat/kehendaknya, demokrasi yang kita idam-idamkan tidak akan terwujud. Membangun *civil society* berarti memperjuangkan ruang politik yang semua warga dapat mengembangkan kepribadian, potensi, serta memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya. Salah satu dari 12 bidang keprihatinan dunia tentang perempuan yang dihasilkan Konverensi Dunia tentang perempuan di Beijing tahun 1995 menekankan bahwa

tercapainya persamaan peluang dan partisipasi di antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan kebijakan negara merupakan prasyarat bagi berfungsinya demokrasi dalam suatu negara

Latar belakang munculnya visi politik transformatif ialah adanya negara-negara di Asia yang dipimpin oleh wanita seperti Indira Gandhi dari India, Corazon Aquino dari Filipina, Benazir Bhutto dari Pakistan, dan Khaleda Zia dari Bangladesh, yang tidak banyak membawa dampak pada kondisi umum perempuan dalam posisi pengambil keputusan di negaranya. Hal ini dikarenakan keberadaan mereka pada posisi pimpinan berasal dari hubungan dengan pimpinan pria sebelumnya yang masih dibayangkan dan tetap dengan cara atau aturan main yang digunakan oleh pimpinan (pria) sebelumnya. Oleh karena itu, tidak terjadi transformasi nilai-nilai, proses, dan kelembagaan yang menunjukkan ciri maupun identitas diri yang mandiri.

Berpolitik memang tidak harus duduk di DPR, tidak harus mengurus negara atau pemerintahan, tidak harus *baku hantam* dan sebagainya. Strategi bagi perempuan memasuki kancah politik perlu membawa serta jati dirinya dan mentransformasikan nilai-nilai karakter femininnya sehingga memberi nuansa baru dunia politik agar politik menjadi lebih "bersih", lebih manusiawi, damai, saling menopang, dan lebih adil. Dalam politik karakter maskulin perlu diimbangi dengan karakter feminin sehingga dapat dibentuk kekuatan sinergi yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kesejahteraan bangsa.

Pendidikan Politik bagi Wanita

Dalam era reformasi saat ini segala sesuatu tentang politik pun perlu direformasi, perlu diposisikan pada hal-

hal yang sebenarnya atau seharusnya. Selain itu, perlu diperhatikan bagaimana peran dan fungsi politik dalam pemerintahan, bagaimana berpolitik yang baik dan santun sehingga politik tidak dipandang hal yang kasar, penuh intrik, menghalalkan segala cara, dan hal-hal lain yang mengesankan politik itu kotor, dan dunia laki-laki saja. Hal ini perlu dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun nonformal. Adapun sasarannya adalah pria dan wanita yang telah dewasa yang diharapkan kelak mampu menggunakan hak-hak politiknya dalam pemilu dan mampu berpolitik dengan baik meskipun tidak harus berpolitik praktis.

Menurut Kartini Kartono (1989: 78-81) pendidikan politik adalah :

- (1) pendidikan mensistematiskan aktivitas sosial dan membangun kebajikan terhadap sesama di suatu wilayah negara,
- (2) identik dengan pembentukan hati nurani politik, yang menyangkut tanggung jawab etis terhadap sesama warga negara,
- (3) menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik,
- (4) mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan politik dan kemasyarakatan, serta
- (5) membahas konflik-konflik aktual, sehingga rakyat mampu untuk menganalisis berbagai konflik, serta ikut memecahkan dengan cara yang diperoleh dari pendidikan politik tadi, bukan dengan cara yang ditekan bahkan dipaksakan dari atas.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa dengan pendidikan politik tidak hanya pemahaman konflik dan peristiwa politik saja, namun rakyat juga diharapkan dapat

melakukan aktivitas politik secara sadar dan benar serta etis untuk mengadakan perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan terhadap struktur kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan. Apalagi khususnya apabila dalam kondisi tidak sehat dan membahayakan orang banyak, kewajiban warganegara yang baik ialah bertanggungjawab secara moral untuk membangun negara dengan aktif berpartisipasi atau mengikuti perkembangan politik. Di sini jelas bahwa politik itu bukan monopoli pemimpin, kaum berduit, atau kelompok istimewa, tetapi politik milik bersama warganegara yang digunakan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat suatu negara.

Tugas pendidikan politik ialah membangun kekuatan kontra melawan situasi politik dan kemasyarakatan yang tidak memuaskan dan disharmoni, menuju usaha humanisasi kehidupan bersama. Pendidikan politik termasuk politik transformatif bagi rakyat dapat diselenggarakan antara lain melalui:

- (1) bahan bacaan seperti buku, dan surat kabar, majalah, dalam bentuk publikasi masa yang biasa membentuk pendapat umum,
- (2) siaran radio dan televisi atau media elektronik lain, dan
- (3) lembaga atau asosiasi dalam masyarakat, dan lembaga pendidikan formal maupun nonformal (Kantaprawira, 1988)

Selain itu, pendidikan politik juga dilakukan oleh organisasi sosial dan partai-partai politik (orsospol).

Fakih (1999: xi - xv) mengutip kategori Giraoux dan Aronowitz, bahwa ada tiga paradigma pendidikan politik, yakni paradigma: konservatif, liberal, dan kritis. Bagi kaum konservatif ketidaksederajatan masyarakat merupakan hukum keharusan alami. Dalam

bentuknya yang klasik, paradigma konservatif dibangun berdasar keyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak dapat merencanakan perubahan sosial, hanya Tuhan yang telah merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu makna di balik itu. Pandangan kaum konservatif adalah bahwa rakyat tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mengubah kondisi mereka, yang penting menjaga keharmonisan dalam masyarakat, menghindari konflik dan kontradiksi.

Bidang pendidikan politik kaum liberal dilakukan dengan cara membangun kelas dan fasilitas baru, memoderenkan peralatan sekolah maupun metodologi pengajarannya yang lebih efisien dan partisipatif, seperti "*learning by doing*" *experimental learning*", dinamika kelompok, atau CBSA. Dalam hal ini pendidikan sebagai sarana menstabilkan norma dan nilai dalam masyarakat. Kaum liberal dan konservatif sama-sama berpendirian bahwa pendidikan adalah apolitik dan "*excellence*" yang merupakan target utama pendidikan. Masyarakat dan politik adalah dua hal yang berbeda.

Pendidikan liberal ini berakar dari suatu pandangan positivisme yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak dan kebebasan, serta mengidentifikasi problem dan upaya modernisasi dan pembangunan demi menjaga stabilitas dalam jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan liberal ini berakar pada cita-cita Barat tentang individualisme. Model tipe mereka adalah manusia rasionalis liberal yang memiliki tiga konsep: (1) semua manusia memiliki potensi yang sama dalam bidang intelektual, (2) tatanan alam maupun norma sosial dapat ditangkap oleh akal, dan (3) individualis,

yakni anggapan bahwa manusia adalah atomistik dan otonom.

Pengaruh pendekatan ini tampak pada pendidikan yang mengutamakan prestasi melalui proses persaingan antarmurid, pembuatan ranking untuk menentukan murid terbaik. Positivisme sangat berpengaruh dalam paradigma pendidikan liberal. Positivisme dalam ilmu sosial yang meminjam pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas, dengan menggunakan kepercayaan adanya universalisme dan generalisasi, melalui metode determinasi serta kumpulan teori/hukum-hukum.

Jika bagi kaum konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo dan bagi kaum liberal pendidikan bertujuan untuk mencapai perubahan moderat, paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik, ekonomi, di mana pendidikan berada. Bagi kaum kritis, kelas dan diskriminasi jender tercermin pula dalam pendidikan. Dalam pandangan paradigma kritis, tugas utama pendidikan politik adalah agar masyarakat bersikap kritis terhadap sistem dan struktur yang dominan seperti ketidakadilan, kemudian melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil (untuk transformasi sosial). Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa tugas utama pendidikan adalah "memanusiakan" kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil. Visi pendidikan dengan paradigma kritis ini adalah melakukan kritik terhadap sistem yang dominan sebagai bentuk pemihakan terhadap rakyat kecil dan tertindas untuk menciptakan sistem sosial baru yang lebih adil. Pendidikan tidak dapat bersikap netral, objektif maupun punya

jarak dengan masyarakatnya sebagaimana anjuran positivisme.

Dalam era reformasi saat ini, setelah 32 tahun rakyat terkekang oleh rezim orde baru, pendidikan politik dan politik transformatif cocok memakai paradigma kritis, baik secara formal maupun nonformal, atau melalui media non elektronik (cetak) maupun elektronik. Pendidikan lewat jalur formal diajarkan dengan pedagogi, yaitu proses pendidikan yang menempatkan objek pendidikan sebagai anak-anak meskipun usia biologis mereka sudah termasuk dewasa. Di sini murid pasif, guru menggurui, mengevaluasi, sedangkan murid digurui, dievaluasi. Konsep yang dipakai dalam pendidikan nonformal menempatkan anak didik atau peserta belajar sebagai orang dewasa yang memiliki kemampuan aktif: merencanakan tujuan, memilih bahan yang dianggap bermanfaat, memikirkan cara terbaik untuk belajar. Dalam hal ini fungsi guru sebagai fasilitator.

Adapun materi pendidikan politik yang perlu diberikan kepada rakyat atau masyarakat antara lain:

1. negara dan sisten ketatanegaraan,
2. hak-hak politik rakyat,
3. partai politik dan profil partai politik peserta pemilu,
4. pemilu dan sistem pemilu,
5. hak-hak asasi manusia, hak-hak sipil dan politik, dan
6. kepemimpinan androgini

Pengertian dasar yang benar tentang negara, pemerintah, rakyat, dan wakil rakyat harus secara sungguh-sungguh ditanamkan kepada rakyat. Pengertian bentuk negara Indonesia yang integralistik yang dirumuskan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sering menyebabkan pemerintah menganggap diri mereka sebagai pengejawantahan diri pribadi

(personifikasi) dari negara, warisan dari konsep budaya Jawa tentang negara sebagai citra kerajaan para dewata. Di situ raja sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan para dewa yang bersifat mutlak dan menyeluruh. Rakyat Indonesia yang telah terbiasa menerima pengertian yang salah itu menjadi tidak memahami publika pengertian modern tentang negara dalam bentuk republik, yang berasal dari kata *res publika* yang artinya urusan bersama seluruh warga yang diatur secara bersama (untuk kemaslahatan bersama). Konsep tersebut jelas-jelas berlawanan dengan konsep pemutlakan dan pemusatan kekuasaan politik. Oleh karena itu, konsep negara modern republik tak bisa dilepaskan dari konsep demokrasi dari kata *demos* dan *kratos* yang artinya kekuasaan yang dimiliki dan diatur oleh kehendak bersama orang banyak atau warga negara, yang tidak lain berarti kedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah yang seharusnya memiliki kekuasaan, bukan presiden.

Pengertian yang mendasar tentang negara dan ketatanegaraan inilah yang secara sengaja dan sistematis melalui proses rekayasa dan indoktrinasi telah dicoba dihapuskan sampai Orde Baru. *Civic Education* atau pelajaran kewarganegaraan oleh Orde Baru sengaja dihapuskan dan diganti dengan pendidikan politik indoktriner yang dikenal dari proses pendidikan politik rakyat Indonesia sejak zaman Demokrasi Terpimpin dengan PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Rakyat akhirnya memiliki pemahaman yang kabur mengenai apa sesungguhnya hakekat, fungsi, dan tujuan negara kita. Oleh karena itu, reformasi dalam bidang politik itu termasuk reformasi dalam pendidikan politik yang berusaha menguraikan kembali

pengertian-pengertian yang salah tentang negara dan kewarganegaraan perlu dilakukan.

Pendidikan politik harus berusaha memberikan informasi tentang hak-hak politik rakyat dan tentang pengertian, asas, dan sistem pemilu. Bagaimana asas langsung, umum, bebas, dan rahasia itu diartikan. Bagaimana sistem distrik, atau proporsional itu. Menurut Balla, dkk (1999: 58-60) sistem distrik adalah sistem di sana wilayah suatu negara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakilnya di parlemen, yang dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang ada di parlemen. Setiap distrik hanya mempunyai satu wakil di parlemen, dari sekian calon yang diajukan oleh partai-partai hanya dipilih satu orang, yakni yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di distrik tersebut. Jadi, yang dipilih oleh rakyat adalah orang yang diajukan oleh partainya. Sementara itu, sistem proporsional adalah sistem pemilu yang berdasarkan aturan bahwa kursi yang tersedia di parlemen pusat dibagikan kepada partai politik peserta pemilu sesuai dengan perimbangan suara yang diperolehnya dalam pemilu.

Pengertian tentang partai dan fungsi partai di negara republik yang demokratis, serta profil-profil partai juga perlu diketahui oleh rakyat. Menurut Ball, dkk. (1999: 49-60) partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara atas dasar sukarela dan persamaan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, bangsa, dan negara, baik melalui pemilu maupun tidak melalui pemilu. Kedaulatan partai politik terletak di tangan anggotanya. Setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, dan hak yang sama dan sederajat, bersifat mandiri dalam mengatur rumah tangga organisasinya. Setiap partai politik

memiliki ciri berdasarkan ideologinya (agama, nasionalis, atau sosialis), tujuan dan program partai.

Adapun fungsi partai di negara republik adalah untuk:

- (1) mengontrol pemerintah,
- (2) melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat, dan
- (3) menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui badan dewan atau badan permusyawaratan rakyat..

Semua ini diperlukan untuk mempersiapkan rakyat dalam pemilu. Pendidikan politik harus dapat memberikan pemahaman tentang pengertian asas dan pelimpahan wewenang, konsep perutusan (*delegate*) dan kuasa penuh (*trustee*), mekanisme pertanggung-gugatan (*accountability*) terhadap "perutusan" dan "kuasa penuh". Menurut Fakih, dkk (1999: 14) pengertian wakil rakyat dalam negara demokrasi secara teori adalah sebagai perutusan (delegasi) dengan kewenangan terbatas dalam membuat keputusan yang mutlak selalu harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada rakyat yang diwakilinya atau yang memilihnya sebagai perutusan. Menempatkan wakil rakyat sebagai kuasa penuh selalu mengandung resiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang sulit dikontrol. Lebih lanjut dikemukakan bahwa wakil rakyat sebagai perutusan sedikit-dikitnya atau paling tidak harus:

- (1) dikenal baik, kalau perlu secara pribadi oleh pemilihnya,
- (2) dapat dihubungi secara langsung setiap saat oleh pemilihnya,
- (3) melakukan konsultasi dan memberikan laporan secara berkala kepada semua warga pemilihnya, dan

(4) tidak boleh membuat keputusan penting/prinsip tanpa persetujuan warga yang memilihnya.

Selain itu, informasi hak-hak asasi manusia (HAM) juga perlu diberikan. Apa yang menjadi landasan HAM dan apa hambatan realisasi kemanusiaan HAM dan bagaimana mengupayakan terwujudnya hak-hak asasi manusia tersebut juga harus diperhatikan.

Mengingat keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memadai dengan jumlah pemilihnya maka pendidikan politik hendaknya banyak melibatkan mereka. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan sasaran wanita saja, atau campuran antara pria dan wanita baik formal maupun nonformal. Bila sasarannya wanita saja, hal itu dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan wanita dari pria di bidang politik. Bila sasarannya campuran, hal itu dimaksudkan untuk memberi wawasan kepada semuanya, khususnya pria tentang perlunya memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk lebih berperan dalam bidang politik. Peran wanita di bidang politik secara organisatoris hendaknya tidak hanya diposisikan untuk membidangi seksi kewanitaan atau pekerjaan yang sebaiknya ditangani wanita, namun juga hendaknya diberi kesempatan berperan di bidang pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam era reformasi ini bidang politik bagi wanita juga perlu direformasi. Reformasinya dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun nonformal, baik melalui lembaga pemerintah maupun nonpemerintah (LSM, partai politik). Ketidakadilan gender memunculkan

adanya politik transformatif. Politik transformatif penting diketahui oleh semua pihak

Kepemimpinan politik perlu menggunakan pendekatan androgini agar dapat menciptakan politik yang santun, tidak kasar, tidak menghalalkan segala cara, dsb. Munculnya politik transformatif dapat meredakan suasana panas suhu perpolitikan kita. Reformasi penting dilakukan terhadap materi pendidikan politik yang selama ini diterapkan oleh orde baru.

Daftar Pustaka

- Balla, J, dkk. (1999). *Panduan Pendidikan Politik untuk Fasilitator*. Yogyakarta: Insist.
- Fakih, M, dkk. (1999). *Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat*. Yogyakarta: Insist
- Hemas, G.K.R. (2000). *Kesadaran Perempuan di Bidang Politik*. Makalah disampaikan dalam sarasehan "Pendidikan Politik bagi Perempuan" Kerjasama PSW UNY dengan BKOW DIY, 4 Maret 2000.
- Kartono, K. (1989). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nahiyah, J. F. (1999). *Bos Wanita antara Feminin dan Maskulin*. Yogyakarta: PSW UNY.
- Nahiyah, J. F. (2000). *Wanita dan Politik: Identifikasi Akar Masalah*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas: